



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.342 / 29 / DPRD-BLG / 2021

TENTANG

PENETAPAN ROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil Keputusan Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan bahwa Program Pembentukan Pembentukan Daerah Kabupaten Balangan akan disepakati dan di tetapkan ;

b. bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama Bupati Balangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor : 130.5/ /PEM/TAHUN 2021 Dan Nomor :188.342/28/DPRD-BLG/ 2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Kasubag	Kabag	Sekwan
P	7	1

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

Kasubag	Kabag	Sekwan
<i>P</i>	<i>J</i>	<i>L</i>

- Memperhatikan : - Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, pada Tanggal 14 Desember 2021;
- Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Balangan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022;

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dalam Prioritas Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 ;

KETIGA : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, yaitu dalam hal:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
- c. keadaan tertentu lainnya yang memasukkan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda DPRD dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 188.342/29/DPRD-BLG/2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 30 Desember 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

Ketua,



AHSANI FAUZAN, SE

Wakil Ketua,



MUHAMMAD IFDALI, S. Sos

Wakil Ketua,



HANIL TAMJID

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.342/29 /DPRD-BLG/ 2021
TANGGAL : 30 Desember 2021

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022

NO	JUDUL RAPERDA	PENGUSUL	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	II
2.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	II
3.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	II
4.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Umum	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	II
5.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Usaha	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	II
6.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	II
7.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan SOTK Nomor 2 Tahun 2021	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	I
8.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah PT. ASABARU DAYA CIPTA LESTARI	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	II
9.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Badan Hukum PDAM	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	Bapemperda
10.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	II
11.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	III
12.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	I

13.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	III
14.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	III
15.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	II
16.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kepada PT. ASABARU DAYA CIPTA LESTARI	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	II
17.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kepada Bank Perkreditan Rakyat	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	II
18.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Kepada PDAM	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	Bapemperda
19.	Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Kelembagaan Adat di Kabupaten Balangan.	INISIATIF	I
20.	Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Penyelenggaraan Kearsipan.	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	I
21.	Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Penggabungan Desa.	Pemerintah Daerah Kab. Balangan	III
22.	Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kab. Balangan.	Pemerintah Daerah Kab. Balangan	III
23.	Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	INISIATIF	III
24.	Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.	INISIATIF	III

25.	Rancangan Perda Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Identitas Daerah	INISIATIF	I
26.	Rancangan Perda Tentang Pemberdayaan Gotong Royong Masyarakat	INISIATIF	I
27.	Rancangan Perda Tentang Perlindungan Perkebunan Rakyat	INISIATIF	II
28.	Rancangan Perda Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata	INISIATIF	II
29.	Rancangan Perda Tentang Penanganan Dan Perlindungan Anak Yatim Piatu Dan Fakir Miskin	INISIATIF	III
30.	Rancangan Perda Tentang Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	INISIATIF	III
31.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021	Pemerintah Daerah Kab. Balangan	
32.	Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.	Pemerintah Daerah Kab. Balangan	
33.	Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.	Pemerintah Daerah Kab. Balangan	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

Ketua,


AHSANI FAUZAN, SE

Wakil Ketua,


MUHAMMAD IFDALI, S. Sos

Wakil Ketua,


HANIL TAMJID